

PROSPEK DIVERSIFIKASI USAHA RUMAH TANGGA DALAM Mendukung KETAHANAN PANGAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Handewi P.S. Rachman, Tri B. Purwantini, dan Yuni Marisa

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jalan A. Yani No. 70 Bogor 16161*

ABSTRACT

This paper aims to study the households' activities diversification to support food security and poverty alleviation in Indonesia based on reviews of literatures and research results. The study shows that households' activities diversification has a strategic prospect to support food security efforts and poverty alleviation. However, to apply the results we have to focus on: (1) At macro level, diversification developing efforts are directed toward policy on development model application focused on job creation and economic activities in rural areas, (2) In the era of regional autonomy, local governments' roles are very strategic in policy implementation on job creation and economic activities through agro-industry development in rural areas based on local resources, (3) Various levels and factors affecting diversification require policy implementation on job creation and economic activities locally specific, (4) Policy on business development for lower and medium income groups facilitates their access to agricultural resources, while for higher income group the policy is to secure their investments in rural areas. Furthermore, policy on reduction of high-cost economy is urgently required.

Keywords : *diversification, food security, poverty alleviation*

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menelaah diversifikasi usaha rumah tangga dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia melalui review hasil-hasil penelitian dan studi pustaka. Hasil review menunjukkan bahwa diversifikasi usaha rumah tangga memiliki prospek strategis dalam mendukung upaya pemantapan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan. Namun demikian dalam penerapannya perlu memperhatikan beberapa hal yaitu: (1) Secara makro upaya pengembangan diversifikasi diarahkan pada penerapan kebijakan model pembangunan yang difokuskan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha di pedesaan, (2) Berkaitan dengan otonomi daerah, peran Pemerintah Daerah sangat strategis dalam operasional kebijakan perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha melalui pengembangan agroindustri di pedesaan berbasis potensi wilayah setempat, (3) Adanya variasi tingkat dan faktor yang mempengaruhi diversifikasi usaha rumah tangga menuntut pentingnya penerapan kebijakan pengembangan perluasan kesempatan kerja dan peluang kerja yang bersifat lokal spesifik, (4) Kebijakan pengembangan diversifikasi usaha bagi kelompok rumah tangga dengan pendapatan rendah dan sedang diarahkan pada fasilitasi untuk akses terhadap sumberdaya pertanian, sedangkan bagi kelompok pendapatan tinggi dukungan kebijakan yang mampu mendorong keamanan dan kenyamanan berusaha bagi investor untuk melakukan investasi di pedesaan. Fasilitasi berupa kebijakan-kebijakan yang mampu menekan ekonomi biaya tinggi merupakan langkah yang perlu ditempuh.

Kata kunci : *diversifikasi usaha, ketahanan pangan, kemiskinan*

PENDAHULUAN

Memantapkan ketahanan pangan (memerangi kelaparan dan rawan pangan) dan menurunkan angka kemiskinan atau jumlah penduduk miskin merupakan agenda besar dalam kerangka pembangunan global (*Millennium Development Goals*). Dalam hal ini FAO (1999) menargetkan bahwa jumlah penduduk

miskin dan rawan pangan di seluruh dunia diharapkan menurun sebesar 50 persen pada tahun 2015. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen untuk memantapkan ketahanan pangan dan menurunkan kemiskinan telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung tercapainya target tersebut. Upaya yang dilakukan antara lain adalah dengan menetapkan pembangunan ketahanan pangan sebagai salah satu program utama

pembangunan nasional. Dalam kaitan ini, Departemen Pertanian telah menetapkan isu ketahanan pangan sebagai salah satu program utama dalam jangka lima tahun ke depan atau 2005-2009 (Departemen Pertanian, 2005). Selain itu, dalam upaya mempercepat dan mensinergiskan program penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah membentuk suatu lembaga khusus yaitu Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang berada dalam koordinasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Bappenas.

Jumlah penduduk miskin sebagian besar berada di pedesaan. Data BPS (2004) menunjukkan bahwa pada tahun 2003 jumlah penduduk miskin mencapai 37,3 juta penduduk. Dari jumlah tersebut, sekitar 67 persen berada di pedesaan, dan sekitar 60 persen bekerja di sektor pertanian. Data Sensus Pertanian tahun 2003 menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 13,7 juta (56,2 persen) petani pengguna lahan termasuk petani gurem (penguasaan lahan garapan kurang dari 0,5 hektar). Dengan fakta seperti itu, adalah logis apabila pembangunan pertanian dan pedesaan perlu mendapat prioritas terkait dengan upaya pemantapan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan. Terbatasnya penguasaan lahan pertanian merupakan kendala utama peningkatan pendapatan rumah tangga pertanian. Oleh karena itu kebijakan pengembangan diversifikasi usaha merupakan salah satu pilihan kebijakan yang perlu mendapat perhatian di masa datang.

Kajian pustaka yang dilakukan Russtra *et al.* (2004) menyimpulkan bahwa beberapa hasil penelitian memperlihatkan adanya peningkatan pendapatan rumah tangga dengan dilakukannya diversifikasi usahatani yang mengikuti pola tanam introduksi. Berbeda dengan temuan tersebut, studi yang dilakukan oleh Rachmat dan Hutabarat (1988) di pedesaan lahan sawah di Kabupaten Nganjuk dan Ngawi, Jawa Timur menunjukkan bahwa dengan melakukan diversifikasi usahatani melalui pengaturan pola tanam dan pergiliran tanaman padi dan palawija (dibanding pola tanam padi-padi-padi) tidak menjamin petani di daerah tersebut dapat meningkatkan pendapatan. Hal ini karena pengusahaan palawija tidak dilakukan secara intensif dan lebih bertujuan untuk pemanfaatan lahan karena keterbatasan sarana irigasi. Sementara

itu pengusahaan tanaman padi menghasilkan pendapatan yang lebih baik dan usahatani palawija membutuhkan tenaga kerja yang lebih sedikit dibanding padi.

Di sisi lain, upaya pemantapan ketahanan pangan dan penurunan kemiskinan tidak terlepas dengan upaya peningkatan pendapatan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena tingkat pendapatan rumah tangga sebagai proksi dari daya beli merupakan salah satu faktor kunci bagi rumah tangga untuk akses terhadap pangan yang dibutuhkan. Selain itu tingkat pendapatan juga merupakan salah satu indikator kunci bagi penetapan batas garis kemiskinan. Tulisan ini menelaah diversifikasi usaha atau sumber pendapatan rumah tangga dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan. Ulasan mencakup perubahan lingkungan strategis dalam pemanfaatan ketahanan pangan dan penurunan kemiskinan; pengertian, ukuran dan pola diversifikasi; serta keterkaitan diversifikasi usaha rumah tangga, ketahanan pangan, dan kemiskinan.

PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS DALAM PEMANTAPAN, KETAHANAN PANGAN DAN PENURUNAN KEMISKINAN

Perubahan lingkungan strategis yang terkait dengan upaya pemantapan ketahanan pangan dan penurunan kemiskinan adalah adanya liberalisasi perdagangan termasuk di dalamnya adalah perdagangan komoditas pertanian dan pangan. Studi tentang dampak liberalisasi perdagangan terhadap pertanian di Indonesia oleh Erwidodo (1999) menunjukkan beberapa temuan antara lain bahwa, sebelum tahun 1985 Indonesia sangat mengutamakan kebijakan proteksi pasar domestik. Kebijakan ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh sebagian besar penerima proteksi tersebut. Dalam rangka mendorong reformasi menuju perdagangan bebas yang digulirkan sejak awal 1980-an, pemerintah memperkenalkan beberapa kebijakan berikut, yaitu: (1) penyederhanaan prosedur kepabeanaan termasuk dikeluarkannya undang-undang kepabeanaan yang baru, (2) menurunkan tarif dan pungutan-pungutan, (3) mengurangi lisensi impor dan hambatan non tarif, (4) deregulasi dari sistem

distribusi, (5) deregulasi regim investasi, dan (6) memantapkan batas wilayah dan prosedur ekspor. Salah satu sektor yang mendapat proteksi cukup tinggi adalah sektor makanan dan minuman (*food and beverage*).

Jepang, Amerika Serikat dan Singapura merupakan tiga negara sumber utama impor Indonesia (Hardono *et al.*, 2004). Disisi lain, total ekspor Indonesia ke ketiga negara tersebut juga dominan. Tahun 1985-1996 ekspor pertanian Indonesia tumbuh dengan laju 10,6 persen/tahun, pada waktu yang sama laju pertumbuhan impor pertanian tumbuh sebesar 15,0 persen/tahun. Dengan demikian surplus perdagangan komoditas pertanian Indonesia cenderung menurun dari waktu ke waktu.

Liberalisasi perdagangan melalui Putaran Uruguay (PU) secara potensial akan memperluas akses pasar untuk Indonesia khususnya ke negara industri. Penurunan tarif pada berbagai pasar ekspor utama akan memperluas akses pasar Indonesia. Hambatan tarif global produk industri ke Indonesia akan diturunkan sekitar 42 persen, sedangkan tarif di negara-negara industri akan turun rata-rata 4 persen. Di Jepang, rata-rata tarif turun 4,4 persen (diluar minyak), Uni Eropa turun sekitar 6,0 persen dan Amerika Serikat turun sekitar 6,5 persen.

Kesepakatan PU diperkirakan akan meningkatkan pendapatan dunia secara signifikan dan terdistribusi secara luas diantara negara maju dan negara berkembang. PU akan berdampak positif terhadap upah riil terutama di negara berkembang. Sejalan dengan hal itu, PU diharapkan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Dalam hal ini Indonesia akan memperoleh manfaat baik dari perdagangan maupun pendapatan. Hasil studi juga menunjukkan indikasi adanya deregulasi perdagangan dengan partner dagang Indonesia yang mengakibatkan tidak hanya kehilangan daya saing ekspor tetapi juga kemungkinan penurunan kesejahteraan masyarakat.

Studi Erwidodo dan Hadi (1999) tentang dampak liberalisasi perdagangan terhadap produksi, konsumsi, perdagangan dan pemasaran beberapa komoditas terpilih (beras, kedelai, jagung, ubikayu dan kentang) di Indonesia, menunjukkan bahwa di tingkat makro, pada kondisi sebelum krisis ekonomi,

liberalisasi perdagangan antar negara melalui penurunan tarif untuk komoditas substitusi impor; akan menurunkan harga di tingkat pedagang besar, harga produsen, kuantitas suplai dan surplus produsen. Namun liberalisasi perdagangan tersebut berdampak meningkatkan kuantitas permintaan, impor dan surplus konsumen. Dampak secara keseluruhan akan meningkatkan *net surplus* atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi besarnya perubahan-perubahan tersebut sangat tergantung pada elastisitas transmisi dari tarif pada harga yang terjadi di tingkat pedagang besar, elastisitas transmisi dari harga di pedagang besar pada harga produsen, dan elastisitas harga penawaran dan permintaan. Elastisitas transmisi tarif yang lebih tinggi akan berdampak besar secara negatif pada surplus produsen tetapi juga berdampak besar secara positif pada surplus konsumen dan secara total berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Di tingkat usahatani, studi tersebut menunjukkan bahwa penurunan tarif akan menurunkan harga di tingkat produsen. Melalui efek harga sendiri dan harga silang, penurunan harga produsen akan menurunkan penggunaan input seperti pupuk dan tenaga kerja yang akan menurunkan produktivitas dan penerimaan bersih usahatani. Seperti terefleksikan pada elastisitas transmisi harga, besarnya dampak pada tingkat usahatani akan tergantung pada efisiensi sistem pemasaran masing-masing komoditas. Makin efisien sistem pemasaran makin besar elastisitas transmisi harga.

Amang dan Sawit (1997) mengingatkan bahwa dampak perdagangan bebas cukup serius buat Indonesia, tidak hanya menyangkut bidang ekonomi tetapi juga bidang non-ekonomi. Perpindahan faktor produksi seperti tenaga kerja, lahan, dan kapital secara cepat dan berlebihan dalam waktu yang relatif singkat dari sektor pertanian dan jasa ke sektor manufaktur; akan menimbulkan masalah baru yang lebih sulit dan mahal untuk mengatasinya. Hampir tidak mungkin dibangun infrastruktur perkotaan yang cukup untuk menampung pesatnya urbanisasi, sehingga akan muncul masalah kekumuhan dan kemiskinan di kota, kepadatan kota, kekurangan tempat tinggal, tidak cukupnya taman, kekurangan air bersih (kualitas dan kuantitasnya),

memburuknya lingkungan hidup dan meningkatnya kriminalitas. Di samping itu, distribusi pendapatan masyarakat juga akan semakin timpang. Oleh karena itu, model-model peramalan untuk mempelajari pengaruh perdagangan bebas terhadap kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya melihat dampak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor, tetapi juga perlu memperhatikan beberapa aspek non-ekonomi seperti diuraikan di atas.

Dari studi dampak kebijakan ekonomi dan liberalisasi perdagangan terhadap penawaran dan permintaan beras di Indonesia 1971-2000, Sitepu (2002) menunjukkan bahwa areal sawah telah mencapai kondisi *closing cultivation frontier*, yaitu mencapai batas maksimum lahan subur yang layak untuk areal sawah akibat meningkatnya kompetisi penggunaan lahan. Sementara itu produktivitas padi telah mengalami pelandaian produksi (*levelling off*), sebagai akibat penggunaan pupuk yang tidak berimbang sehingga respon produksi terhadap harganya menjadi inelastis.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Sitepu (2002), kebijakan harga dasar gabah akan menyebabkan *net surplus* bertambah, sedangkan kebijakan penghapusan subsidi harga input berdampak pada penurunan produksi dan pendapatan petani. Namun demikian, total *net surplus* akan mengalami peningkatan. Pemberlakuan liberalisasi perdagangan (dalam hal ini melalui penghapusan peran BULOG dalam pengadaan dan penyaluran gabah/beras serta penghapusan tarif) tidak efisien dan tidak tepat untuk dilaksanakan karena keuntungan yang diterima oleh konsumen lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang diterima oleh produsen, sehingga total *net surplus* berkurang. Alternatif kebijakan ini merugikan petani kecil yang umumnya miskin dan akan memperburuk distribusi pendapatan.

Indikasi dampak negatif dari liberalisasi terhadap petani (pertanian) juga terjadi di negara maju seperti Jepang. Studi Kamiya (2002) menyebutkan, liberalisasi menyebabkan harga komoditas pertanian di pasar domestik Jepang yang semula sangat tinggi karena diproteksi menjadi terus menurun. Penurunan harga tersebut mengakibatkan perusahaan komoditas pertanian menjadi tidak menguntungkan. Akibat selanjutnya, banyak areal pertanian yang dibiarkan tidak

tergarap disamping semakin sedikit petani yang bersedia mengusahakan.

Studi Hardono *et al.* (2004) menyimpulkan bahwa perbedaan dalam pemilihan sumberdaya, penguasaan teknologi produksi, perkembangan ekonomi dan komitmen pemerintah untuk membela kepentingan produsen di dalam negeri, sangat menentukan kemampuan Indonesia bersaing dalam pasar global yang makin liberal. Dalam konteks ketahanan pangan, meskipun neraca perdagangan pangan Indonesia masih menunjukkan adanya surplus perdagangan, akan tetapi Indonesia dihadapkan pada bayang-bayang suram nasib komoditas pangan strategis (beras) yang semakin bergantung pada pasok pasar global.

Studi Saliem *et al.* (2003) untuk kasus komoditas beras menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan berdampak pada penurunan ketahanan pangan nasional yang diukur dari tingkat kemandirian (ketergantungan pada produksi domestik) beras nasional. Sawit dan Rusastra (2005) mengemukakan bahwa sebaiknya Indonesia tidak melangkah lebih jauh untuk meliberalisasi sektor pangan khususnya dan sektor pertanian umumnya. Alasannya adalah karena semakin dalam liberalisasi pangan dilakukan, maka Indonesia akan semakin memperlemah ketahanan pangan dan pembangunan pedesaannya serta semakin menyulitkan dalam mengatasi kemiskinan.

PENGERTIAN DIVERSIFIKASI, UKURAN DAN POLA DIVERSIFIKASI

Pengertian Diversifikasi

Berbagai pendapat para ahli tentang definisi diversifikasi telah diulas secara luas oleh Pakpahan (1990). Beberapa definisi tersebut adalah: (1) '*rural diversification is a process of broadening and strengthening the income sources of rural household. The process extends from the introduction of new crop and technologies into traditional farming systems to the development of off-farm jobs in small scale rural industries.....At this level of generality rural diversification can be viewed as a gradual and invietable process*'; (2) diversifikasi berarti perluasan dari suatu produk yang diusahakan selama ini ke produk atau industri baru yang sebelumnya tidak

dusahakan. Ini dilakukan untuk meminimumkan risiko, untuk menghindari akibat buruk dari fluktuasi ekonomi, dan atau sebagai sumber pertumbuhan perusahaan; (3) *'diversification is one of the precautions which resource administration or mergers can use in adjusting to an uncertainty situation. The logic is inherent..... Where choice must be made in respect to a future characterized by imperfect knowledge'*.

Dari tiga definisi di atas menunjukkan adanya definisi yang beragam tergantung konteks permasalahannya. Definisi diversifikasi Bank Dunia lebih mengkaitkan dengan permasalahan pembangunan pedesaan atau transformasi struktur ekonomi pedesaan. Stiegler dan Thomas memberikan definisi diversifikasi secara lebih sempit terkait dengan upaya perusahaan meminimumkan risiko dan menjadikan sebagai sumber pertumbuhan. Sementara itu, Heady lebih menekankan pada masalah organisasi masukan dan luaran dalam konteks perusahaan yang dihadapkan pada masalah risiko dan ketidakpastian.

Dalam pertanian, diversifikasi dikatakan sebagai pergeseran sumberdaya dari satu tanaman (ternak) menjadi campuran tanaman atau ternak, untuk mengurangi kegagalan akibat risiko alam dan meningkatkan hasil dari tiap komoditas yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani. Definisi diversifikasi ini menekankan pentingnya perubahan sumberdaya bernilai rendah menjadi komoditas yang bernilai tinggi, yang sering direfleksikan sebagai peningkatan tingkat spesialisasi ke dalam aktifitas yang bernilai tinggi, umumnya di tingkat usahatani (Yoshi *et al.*, 2003).

Menurut Kasryno *et al.* (2004), dilihat dari segi ekonomi, diversifikasi bertujuan memperkecil risiko yang disebabkan oleh dinamika harga dan faktor ekonomi lainnya serta perubahan iklim. Dari segi pemanfaatan sumberdaya, diversifikasi berpeluang meningkatkan pemanfaatan sumberdaya manusia, peningkatan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta pemanfaatan sumberdaya alam dan modal. Dari segi budidaya, diversifikasi dapat memperkecil pengaruh iklim dan dapat memperkecil intensitas serangan hama penyakit tanaman melalui pemutusan siklus.

Dari berbagai definisi, secara umum, diversifikasi dapat diterangkan sebagai berikut:

(1) pergeseran sumberdaya dari kegiatan usahatani ke non-usahatani; (2) penggunaan sumberdaya dalam skala besar berupa campuran dari berbagai komoditas dan kegiatan yang menunjangnya, dan (3) perubahan sumberdaya dari komoditas pertanian bernilai rendah ke komoditas pertanian bernilai tinggi (Hayami dan Otsuka, 1992). Sedangkan alasan melakukan diversifikasi adalah untuk: (1) memaksimalkan efisiensi penggunaan sumberdaya terutama efisiensi penggunaan lahan dan waktu, simbiosis dalam usaha dan intensifikasi penggunaan tenaga kerja; (2) mengurangi risiko produksi, harga dan pendapatan; (3) merespon perubahan permintaan untuk berbagai komoditas pertanian yang diakibatkan oleh perubahan pendapatan per kapita dan elastisitas pendapatan terhadap permintaan dari berbagai komoditas pertanian; dan (4) mempertahankan kesuburan lahan dan mengurangi kerusakan ekosistem.

Pengertian diversifikasi dalam tulisan ini terkait dengan masalah keragaman sumber pendapatan (usaha) rumah tangga di pedesaan. Konsep serupa digunakan pula oleh Susilowati *et al.* (2002). Dalam konsep diversifikasi usaha rumah tangga pedesaan tersebut terkait dengan keragaman ekonomi wilayah atau diversifikasi pedesaan (Bank Dunia, 1988). Diversifikasi pedesaan merupakan suatu proses semakin beragam dan semakin banyaknya jenis pekerjaan yang dijadikan sebagai usaha rumah tangga pedesaan untuk memperoleh pendapatan.

Ukuran Diversifikasi

Diversifikasi dapat diukur melalui beberapa metoda tergantung dari tujuan studi. Beberapa di antaranya adalah: (1) *Index of maximum proportion*; (2) *Herfindal Index*; (3) *Simpson Index*; (4) *Ogive Index*; (5) *Entropy Index*; dan (6) *Composite Entropy Index* (Kelley *et al.*, 1995; Pandey and Sharma, 1996; Ramesh Chand, 1996). Masing-masing metode ini mempunyai kekurangan dan kelebihan, oleh karena itu ketepatan pemilihan dan penggunaan ukuran diversifikasi tergantung pada tujuan analisis.

Derajat diversifikasi umumnya diukur dengan suatu indeks diversifikasi. Needham (dalam Pakpahan, 1990) dalam konteks perusahaan menyebutkan adanya tiga jenis

indeks diversifikasi yaitu: (1) diukur dengan nisbah hasil sampingan perusahaan terhadap jumlah output total atau nisbah antara hasil sampingan terhadap pekerja (*employment*) dari perusahaan tersebut; (2) diukur dari jumlah jenis industri; dan (3) diukur menurut hasil kali nisbah produk sampingan terhadap total output dengan jumlah industri atau komoditas yang diusahakan. Indeks diversifikasi (3) merupakan gabungan dari indeks diversifikasi (1) dan (2).

Sementara itu Strout (1975) merumuskan lima buah indeks diversifikasi untuk mengukur keragaan diversifikasi dalam konteks usahatani dengan mengukur indeks tumpang sari (*simultaneous cropping*) dan indeks tumpang gilir (*sequential cropping*). Kelima indeks tersebut adalah (1) *Multiple Cropping Index* (MCI), (2) *Diversity Index* (DI), (3) *Harvest Diversity Index* (HDI), (4) *Land Utilization Index* (LUI), dan (5) *Simultaneous Cropping Index* (SCI). Lima indeks diversifikasi tersebut antara lain telah digunakan oleh Tim Studi Diversifikasi (Puslitbang Sosek Pertanian, 2003) dalam menganalisis tingkat atau derajat diversifikasi usahatani di lahan sawah di lima kabupaten sentra produksi padi di Jawa.

Indeks Entropy merupakan salah satu ukuran diversifikasi yang telah banyak digunakan untuk mengukur keanekaragaman konsumsi rumah tangga (Pakpahan dan Hastuti, 1990; Erwidodo *et al.*, 1999) maupun keanekaragaman sumber pendapatan rumah tangga (Susilowati *et al.*, 2002). Indeks mana yang akan digunakan dalam analisis tergantung dari tujuan analisis dan ketersediaan data.

Pola Diversifikasi

Pola diversifikasi di Asia secara umum dapat diungkapkan sebagai berikut: (1) Sektor pertanian di Asia Selatan secara bertahap terdiversifikasi dalam bentuk komoditas dengan nilai tinggi, seperti buah-buahan, sayuran, ternak dan hasil olahan ikan; (2) Kebanyakan diversifikasi muncul hanya dengan sedikit dukungan dari pemerintah karena kebijakan pemerintah masih terobsesi dengan swasembada sereal; (3) Walaupun masih fokus pada produksi pangan, terjadi perubahan secara perlahan-lahan pada komoditas

dengan nilai tinggi (*high value commodity*) yang direfleksikan dengan meningkatnya produksi buah-buahan, sayuran, ternak dan produk ikan; (4) Perkembangan produksi komoditas alternatif tersebut dikendalikan oleh permintaan (*demand-driven*), tidak seperti padi atau tanaman pangan lainnya yang bersifat *supply-driven*; (5) Introduksi benih/bibit unggul (hibrida) dan unggul baru serta sarana dan prasarana seperti irigasi (pompanisasi), pasar dan jalan merupakan faktor kunci yang menentukan dan mempengaruhi status diversifikasi.

Implikasi diversifikasi dapat dianalisis pada kinerja ketahanan pangan, kesempatan kerja dan devisa (*export earnings*). Pada tingkat makro, ketahanan pangan tidak memberikan pengaruh yang berlawanan terhadap diversifikasi. Pengembangan komoditas bernilai tinggi berpontesi dalam memperluas kesempatan kerja dan memberikan kontribusi dalam perdagangan internasional. Untuk mempercepat proses diversifikasi pertanian, diperlukan pengaturan kembali kelembagaan yang dapat mengintegrasikan produksi dan pasar dengan tepat.

Pertanian di Indonesia masih didominasi oleh pertanian keluarga skala kecil sehingga upaya untuk meningkatkan pendapatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki petani adalah dengan diversifikasi usaha. Luas garapan yang sempit mendorong petani memaksimalkan pendapatan dengan cara meningkatkan sistem tanam, intensitas tanam dan pola tanam. Upaya peningkatan produksi padi secara monokultur tidak sinergis dengan peningkatan pendapatan petani. Dengan kata lain insentif bagi petani untuk mendukung peningkatan produksi padi tidak memadai (Sumaryanto, 2004). Diversifikasi usaha merupakan alternatif untuk meningkatkan usahatani. Fagi dan Partohardjono (2004) mengatakan ada lima strategi pertanian rumah tangga yang dapat diupayakan untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi kemiskinan, yaitu: (1) intensifikasi pola produksi; (2) penganeekaragaman produksi dan pengolahan hasil; (3) perluasan pertanaman atau peningkatan jumlah kepemilikan tanah; (4) peningkatan pendapatan dari luar pertanian baik yang berbasis pertanian maupun non pertanian; dan (5) usaha luar sektor pertanian apabila potensi sumberdaya tidak prospektif. Namun Simatupang (2004)

mengatakan bahwa kebanyakan petani padi enggan melakukan diversifikasi produksi usahatani. Salah satu alasannya adalah jaminan ketahanan pangan rumah tangganya yang akan turun bila mereka tidak menanam padi.

Pada dasarnya sejak dulu petani Indonesia sudah menerapkan diversifikasi pertanian untuk memenuhi beragam kebutuhan konsumsi keluarga. Diversifikasi usahatani masa depan hendaklah sesuai dengan dinamika permintaan pasar dan upaya meningkatkan pendapatan petani. Sinergi kebijakan pembangunan pertanian melalui intensifikasi dan diversifikasi usahatani dapat dilakukan dengan perencanaan pola tata tanam optimal yang menyertakan komoditas bernilai ekonomi tinggi. Meningkatnya ketersediaan dan jangkauan teknologi maju serta informasi pasar akan mengoptimalkan pola diversifikasi yang diterapkan petani. Diversifikasi pertanian yang dapat merespon perubahan permintaan pasar akan lebih meningkatkan keterkaitan sektor pertanian dengan sektor ekonomi lainnya dan keterkaitan antar desa dan kota, baik melalui keterkaitan barang, tenaga kerja dan modal. Kasryno *et al.* (2004) menyimpulkan bahwa pola usaha pertanian dan diversifikasi dipengaruhi oleh potensi sumberdaya, jangkauan petani pada teknologi maju, dinamika permintaan pangan, kebijakan investasi dan kebijakan ekonomi makro dan mikro pemerintah. Diversifikasi pertanian menghendaki desentralisasi manajemen pembangunan, karena intinya adalah optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian.

KETERKAITAN DIVERSIFIKASI USAHA RUMAH TANGGA, KETAHANAN PANGAN, DAN PENURUNAN KEMISKINAN

Meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui upaya peningkatan pendapatan rumah tangga merupakan sasaran akhir dari pembangunan nasional. Dikaitkan dengan upaya pemantapan ketahanan pangan, tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor kunci bagi rumah tangga untuk akses terhadap pangan yang dibutuhkan. Sementara itu, dikaitkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, tingkat pendapatan merupakan salah satu dimensi dan ukuran yang sering

digunakan untuk menetapkan batas garis kemiskinan. Oleh karena itu tingkat pendapatan (rumah tangga) merupakan faktor penting dalam upaya pemantapan ketahanan pangan dan upaya penanggulangan kemiskinan. Pemahaman mengenai struktur, besaran, distribusi, dan keragaman (diversifikasi) pendapatan masyarakat merupakan bahan masukan yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan pembangunan.

Dalam analisis struktur pendapatan, pemilahan sumber pendapatan dan diversifikasi usaha rumah tangga menurut sektor dan sub sektor bermanfaat untuk memahami potensi dan arah kebijakan pengembangan bagi sektor dan sub-sektor yang perlu mendapat prioritas penanganan kaitannya dengan peningkatan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja di suatu wilayah. Selain itu, analisis tentang distribusi pendapatan penduduk berguna untuk memahami tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan yang ada di antara berbagai golongan pendapatan.

Kecenderungan bahwa pendapatan rumah tangga di daerah-daerah *non-rice base farming* lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga pada daerah tradisional *rice base farming*, memberi petunjuk bahwa masyarakat petani sebenarnya responsif dan berusaha memanfaatkan bekerjanya mekanisme harga sebagai indikator ekonomi yang mengatur mereka dalam mengalokasikan sumberdaya seoptimum mungkin (Rasahan, 1988). Fenomena tersebut mempunyai implikasi penting bagi pemerintah dalam rangka mengevaluasi konsekuensi ekonomis dari upaya-upaya mempertahankan swasembada beras dan penggalakan program diversifikasi pertanian guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Rasahan (1988) menunjukkan bahwa terdapat dua pola utama yang mencirikan keadaan struktur dan distribusi pendapatan masyarakat pedesaan, yaitu: *pertama*, ada hubungan searah antara distribusi pendapatan dengan penguasaan lahan pertanian. Pola ini umumnya dikenal pada masyarakat agraris di mana sumberdaya lahan (*land base agriculture*) memegang peranan dominan dalam menciptakan arus masuk pendapatan masyarakat pedesaan. Hal ini tampak di pedesaan Jawa maupun Luar Jawa. Dengan kata lain, ketimpangan maupun pemerataan distribusi

pendapatan dapat dijelaskan atau terefleksi pada ketimpangan maupun pemerataan distribusi penguasaan lahan ataupun penggarapan lahan pertanian.

Kedua, ada hubungan terbalik antara konsentrasi pendapatan dengan konsentrasi penguasaan atau penggarapan lahan pertanian. Usaha nonpertanian atau usaha *non land base agriculture* dilihat sebagai alternatif sumber pendapatan rumah tangga pedesaan. Usaha tersebut dapat memberikan bias negatif maupun positif terhadap distribusi masyarakat pedesaan. Bias negatif terjadi apabila kehadiran usaha *non land base agriculture* sebagai sumber kegiatan menghasilkan arus pendapatan yang justru memperburuk distribusi pendapatan (kasus desa-desa Patanas Sulawesi Selatan), dan sebaliknya untuk bias positif (kasus desa-desa Patanas Jawa Barat).

Analisis diversifikasi atau keragaman sumber pendapatan dan ketahanan pangan serta kemiskinan, tidak terlepas dari membahas kerawanan pangan dan konsep ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan terjemahan dari *food security*, yang secara luas diartikan sebagai terjaminnya akses pangan bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya agar dapat hidup sehat dan dapat beraktivitas. Kerawanan pangan (*food insecurity*) di tingkat wilayah maupun tingkat rumah tangga dan individu merupakan kondisi tidak tercapainya ketahanan pangan di tingkat wilayah, rumah tangga dan individu. Membahas ketahanan pangan (dan juga kerawanan pangan) pada dasarnya juga membahas hal-hal yang menyebabkan orang tidak tercukupi kebutuhan pangannya. Tidak tercukupinya kebutuhan pangan dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, distribusi, dan akses terhadap pangan.

Hasil penelitian Saliem *et al.* (2001) menunjukkan bahwa ketahanan pangan di tingkat wilayah tidak menjamin tercapainya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa walaupun Lampung, D.I Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara tergolong provinsi dengan status tahan pangan terjamin, namun di masing-masing provinsi tersebut masih ditemukan proporsi rumah tangga rawan pangan berkisar 22-30 persen. Selain itu ditemukan pula bahwa tidak terpenuhinya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga bukan

disebabkan oleh faktor ketersediaan pangan, namun lebih disebabkan oleh aspek distribusi dan daya beli. Faktor distribusi antara lain dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana jalan, transportasi, biaya angkut. Naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada periode 2005-2006 yang mencapai hampir dua kali lipat, diperkirakan meningkatkan jumlah penduduk miskin atau rawan pangan. Sementara itu faktor daya beli sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan harga-harga komoditas pangan.

Identifikasi dan pemetaan wilayah rawan pangan umumnya bertujuan untuk mengetahui situasi pangan wilayah agar dapat dilakukan tindakan intervensi dan penanganan wilayah yang termasuk kategori rawan pangan. Identifikasi wilayah rawan pangan terkait dengan upaya untuk mengidentifikasi dan menentukan atau menghitung jumlah penduduk yang rawan pangan di suatu wilayah. Lembaga pangan dan pertanian dunia (*Food and Agriculture Organization/FAO*) secara berkala melakukan studi untuk mengkaji perkembangan wilayah rawan pangan dan jumlah penduduk rawan pangan di berbagai negara (FAO, 1999). Kegiatan tersebut terkait dengan hasil kesepakatan para pemimpin negara di dunia pada *Word Food Summit* 1996 untuk menurunkan separuh (50%) jumlah penduduk dunia yang kurang gizi (rawan pangan) pada tahun 2015.

Metode mengidentifikasi dan menghitung penduduk rawan pangan (*chronic food insecurity*) yang digunakan oleh FAO (1999) adalah mengestimasi jumlah penduduk di suatu negara (dan dunia) yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan (diukur dengan jumlah kalori yang dikonsumsi) sesuai kebutuhan normatif kesehatan agar seseorang dapat hidup sehat dan beraktivitas sehari-hari. Dalam perhitungan empiris, identifikasi tersebut menggunakan dua pendekatan analitik yang berbeda namun saling mengisi (komplemen) yaitu: (1) menghitung jumlah penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan dari data ketersediaan pangan dan tingkat konsumsi penduduk di masing-masing negara yang dikategorikan sebagai *undernourishment*, dan (2) menghitung jumlah penduduk yang tergolong *undernutrition* yang didasarkan pada data umur, berat badan dan tinggi seseorang terhadap kebutuhan konsumsi pangan. Kedua

pendekatan tersebut pada dasarnya menggunakan pendekatan yang sama yaitu memperhitungkan asupan pangan (dan gizi) atau *food intake*.

Dikaitkan dengan masalah kemiskinan di Indonesia, identifikasi dan karakteristik wilayah miskin telah banyak dilakukan dan kajian tersebut mengemuka di awal tahun 1990-an, di mana pada saat itu program prioritas nasional diarahkan pada program pengentasan atau penanggulangan kemiskinan. Dalam kaitan ini, selama tiga tahun berturut-turut Badan Litbang Pertanian mendapat tugas melaksanakan kajian identifikasi wilayah miskin dan upaya penanggulangannya di 27 provinsi di Indonesia serta melakukan evaluasi berbagai program lingkup Departemen Pertanian yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Metode yang digunakan Badan Litbang Pertanian untuk mengidentifikasi wilayah miskin (rawan pangan) adalah dengan menelaah berbagai karakteristik wilayah yang diduga menjadi penyebab suatu wilayah tergolong miskin. Berbagai karakteristik yang diidentifikasi tersebut adalah aspek sumberdaya alam, teknologi, sumberdaya manusia, dan sarana/prasarana dan kelembagaan yang ada di suatu wilayah (Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 1991/92, 1992/93, dan 1993/94). Beberapa temuan penting dari studi yang dilakukan Badan Litbang Pertanian tersebut adalah bahwa karakteristik suatu wilayah tergolong miskin adalah: (1) aspek sumberdaya alam berupa lahan kurang subur, pendayagunaan lahan tidak optimal, dan adanya degradasi lahan, (2) aspek teknologi berupa adopsi teknologi rendah, ketersediaan sarana produksi terbatas, adanya serangan hama/penyakit, (3) aspek sumberdaya manusia berupa tingkat pendidikan rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, tingkat kesehatan masyarakat rendah, lapangan pekerjaan terbatas, dan adanya tradisi atau adat istiadat yang menghambat, dan (4) dari aspek sarana, prasarana, dan kelembagaan adalah daerah terisolir, modal terbatas, kelembagaan catur sarana produksi pertanian tidak berfungsi maksimal, pemilikan/penguasaan lahan sempit, sistem bagi hasil tidak adil, dan tingkat upah yang rendah.

Selain itu identifikasi wilayah miskin dilakukan pula oleh Departemen Dalam Negeri

(Ditjen Bangda) yang melakukan identifikasi dan mengelompokkan desa-desa dan kecamatan miskin di seluruh Indonesia (Anonimous, 1990). Pada dasarnya identifikasi dan klasifikasi yang dilakukan untuk menentukan desa IDT mencakup berbagai aspek mulai dari keamanan, sosial, politik, dan sarana prasarana yang tersedia di desa tersebut.

Departemen Kesehatan bersama dengan Departemen Pertanian dan BKKBN juga telah melakukan kegiatan yang terkait dengan identifikasi wilayah rawan pangan dalam kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) (Anonimus, 2000). Kegiatan SKPG dimaksud untuk mendeteksi secara dini wilayah yang mempunyai risiko rawan pangan dan mengantisipasi tindakan atau intervensi yang perlu dilakukan oleh Pemda dan atau masyarakat setempat. Indikator yang digunakan dalam menentukan wilayah rawan pangan dari kegiatan SKPG ini adalah: (1) dari sektor pertanian adalah proporsi areal puso dari tanaman padi, (2) dari sektor kesehatan adalah proporsi atau prevalensi KEP (kurang energi protein) dari anak balita, dan (3) dari konteks BKKBN adalah proporsi keluarga miskin (prasejahtera dan sejahtera I).

Sementara itu, untuk menentukan tingkat kemiskinan penduduk, Sayogyo (1977) telah mengajukan batasan garis kemiskinan dengan menggunakan ukuran pendapatan setara beras. Dalam hal ini batas tersebut adalah 240 kg equivalen beras/kapita/tahun dan 360 kg equivalen beras/kapita/tahun masing-masing untuk daerah pedesaan dan perkotaan. Dengan batas garis kemiskinan tersebut, maka seseorang termasuk miskin apabila tingkat pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan tersebut. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS, 2003) setiap tahun telah menetapkan batasan garis kemiskinan dengan menggunakan batasan besarnya pengeluaran untuk kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, pendidikan) yang juga membedakan untuk daerah pedesaan dan perkotaan. Berdasar batasan tersebut dapat dihitung jumlah penduduk Indonesia yang tergolong miskin. Uraian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendapatan merupakan penentu seseorang atau rumah tangga tergolong miskin atau tidak. Sementara itu, diversifikasi usaha rumah tangga menjadi salah satu penentu tingkat pendapatan rumah tangga.

Hasil penelitian Saliem *et al.* (2005) menyimpulkan bahwa diversifikasi usaha memiliki prospek yang cukup strategis sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan. Namun demikian operasionalisasi kebijakan pengembangan diversifikasi usaha tidak direkomendasikan dilakukan secara generik dan bersifat pemasalan. Kebijakan pengembangan diversifikasi usaha tersebut perlu mempertimbangkan dinamika permintaan pasar, cakupan wilayah, agroekosistem, dan kelompok sasaran rumah tangga.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Diversifikasi mempunyai arti yang beragam tergantung dengan konteks permasalahan apa yang dilihat, sehingga bisa dilihat dari dimensi wilayah, lapangan pekerjaan atau subsektor dari sektor tertentu seperti sektor pertanian dan lain-lain. Dalam kaitan ini, diversifikasi usaha rumah tangga terkait dengan masalah keragaman sumber pendapatan rumah tangga. Ada beberapa alat atau metode untuk mengukur diversifikasi tergantung dari tujuan studi, masing-masing metode mempunyai kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu ketepatan pemilihan dan penggunaan ukuran diversifikasi tergantung pada tujuan analisis

Pengaruh adanya diversifikasi dapat dianalisis pada kinerja ketahanan pangan, kesempatan kerja dan devisa (*export earning*). Pada tingkat makro, ketahanan pangan tidak memberikan pengaruh yang berlawanan terhadap deversifikasi. Pengembangan komoditas bernilai tinggi berpotensi untuk memperluas kesempatan kerja dan memberikan kontribusi dalam perdagangan internasional. Untuk mempercepat proses diversifikasi pertanian, diperlukan pengaturan kembali kelembagaan yang dapat mengintegrasikan produksi dan pasar dengan tepat.

Pertanian di Indonesia masih didominasi oleh pertanian keluarga skala kecil, sehingga upaya untuk meningkatkan pendapatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki petani adalah dengan diversifikasi usaha, agar dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga petani. Analisis

diversifikasi atau keragaman sumber pendapatan dan ketahanan pangan serta kemiskinan tidak terlepas dari permasalahan kerawanan pangan dan konsep ketahanan pangan.

Adanya variasi tingkat dan faktor yang mempengaruhi diversifikasi usaha rumah tangga antar wilayah (desa-kota), antar kelompok pendapatan maupun antar agroekosistem menuntut pentingnya penerapan kebijakan pengembangan perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha yang bersifat lokal spesifik.

Implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan adalah: *pertama*, pada tataran makro, upaya pengembangan diversifikasi semestinya diarahkan pada penerapan kebijakan model pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan semata, namun lebih mengedepankan adanya perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di pedesaan. Untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan rumah tangga di pedesaan, upaya pengembangan investasi antara lain di bidang agroindustri yang mendorong penciptaan nilai tambah produk berbasis pertanian dan memperluas lapangan kerja menjadi kebutuhan mendesak. Kebijakan tersebut akan membuka peluang kesempatan rumah tangga di pedesaan melakukan diversifikasi usaha untuk meningkatkan pendapatan dan akses terhadap pangan dan menurunkan kemiskinan di pedesaan.

Kedua, dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, peran pemerintah daerah sangat strategis dalam operasionalisasi kebijakan perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha di pedesaan. Fasilitas yang dapat diperankan oleh Pemda dalam kaitan penciptaan kesempatan kerja di pedesaan adalah mendorong pengembangan agroindustri di pedesaan berbasis potensi wilayah setempat. Upaya ini perlu didukung oleh: (1) penyediaan sarana dan prasarana jalan, pelabuhan, pasar, dan sarana transportasi yang diharapkan dapat menurunkan biaya produksi dan pemasaran produk, (2) kemudahan perizinan dan penghapusan biaya atau pungutan-pungutan yang dapat menekan ekonomi biaya tinggi, dan (3) pentingnya menerapkan kebijakan yang pro pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani secara konsisten dan berkelanjutan.

Ketiga, adanya variasi tingkat dan faktor yang mempengaruhi diversifikasi usaha rumah tangga antar wilayah (desa-kota), antar kelompok pendapatan maupun antar agro-ekosistem, menuntut pentingnya penerapan kebijakan pengembangan perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha yang bersifat lokal spesifik. Untuk wilayah pedesaan bisa diterapkan pengembangan pola *family farming* yang bersifat lokal spesifik dengan mengembangkan komoditas unggulan daerah setempat yang potensial dan memiliki prospek pasar baik. Sedangkan untuk daerah perkotaan dapat dikembangkan usaha-usaha di sektor informal, secara terencana sesuai kompleksitas di daerah perkotaan.

Keempat, kebijakan pengembangan diversifikasi usaha bagi kelompok rumah tangga dengan pendapatan rendah dan sedang semestinya diarahkan pada pemberian fasilitasi dan penyediaan serta kemudahan rumah tangga pertanian untuk akses terhadap sumberdaya pertanian (sarana produksi, modal, dan teknologi) sebagai pilihan kebijakan yang patut dikedepankan. Sementara itu, bagi kelompok rumah tangga berpendapatan tinggi, kebijakan yang mampu mendorong kenyamanan dan keamanan dalam berusaha berupa dukungan untuk terciptanya keamanan lingkungan yang mendukung investor melakukan investasi di pedesaan khususnya merupakan pilihan yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Amang, B. dan M.H. Sawit. 1997. Perdagangan Global dan Implikasinya Pada Ketahanan Pangan Nasional. *Agro-Ekonomika* No. 2 Tahun XXVII : 1-14. Perhepi. Jakarta.

Anonimous. 1990. Rekap Kecamatan Miskin di Seluruh Indonesia. Direktorat Bangda. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.

Anonimous. 2000. Situasi Pangan dan Gizi di Indonesia. Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Pusat. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2004. Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2003: Buku I: Provinsi. Jakarta

BPS. 2002. Statistik Indonesia. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

BPS. 2003. Statistik Indonesia. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Departemen Kesehatan . 1981. Daftar Komposisi Bahan Makanan. Jakarta.

Departemen Pertanian. 2005. Rencana Pembangunan Pertanian Tahun 2005-2009. Jakarta.

Erwidodo dan P.U. Hadi. 1999. Effects of Trade Liberalization on Agriculture in Indonesia: Commodity Aspects. The CGPRT Centre. Working Paper No 48.

Erwidodo, H.P. Saliem, M. Ariani dan E. Ariningsih. 1999. Pengkajian Diversifikasi Konsumsi Pangan Utama di Indonesia. Laporan Hasil Penelitian, Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor

Erwidodo. 1999. Effects of Trade Liberalization on Agriculture in Indonesia: Institutional and Structural Aspects. The CGPRT Centre. Working Paper No 41.

Fagi, A.M. dan S. Partohardjono. 2004. Diversifikasi Usahatani Berorientasi Padi *dalam* Kasryno *et al.* (Eds) *Ekonomi Padi dan Beras Indonesia* (hlm. 201-224). Badan Litbang Pertanian. Jakarta.

FAO. 1999. Food Insecurity, When People Must Live with Hunger and Fear Starvation, The State of Food Insecurity in The World. Rome.

Hardono, G.S., H.P.S. Rachman, dan S.H. Suhartini. 2004. Liberalisasi Perdagangan: Sisi Teori, Dampak Empiris dan Perspektif Ketahanan Pangan. *FAE* 22 (2) : 75 – 88

Hayami. Y., K. Otsuka. 1992. Beyond the Green Revolution: Agricultural Development Strategy into New Century. In *Agricultural Technology : Policy Issues for International Community*. Washington DC. USA. The World Bank.

Joshi, P.K., Ashok Gulati, Pratap S. BIRTHAL, Laxmi Tewari. 2003. Agricultural Diversification in South Asia : Patterns, Determinants and Policy Implication. IFPRI.

Kamiya, M. 2002. *1990s: A Decade for Agricultural Policy Reform in Japan- Breakaway from the Postwar Policies*. Food and Agricultural Policy Research Center. Tokyo *dalam* Hadi *et al.* 2003. Dampak Implementasi Perdagangan Bebas AFTA-2003 Terhadap Pertanian Indonesia. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

Kasryno, F., A.M. Fagi dan E. Pasandaran. 2004. Kebijakan Produksi Padi dan Diversifikasi

- Pertanian *dalam* Kasryno *et al.* (Eds) Ekonomi Padi dan Beras Indonesia (hlm. 73-106). Badan Litbang Pertanian. Jakarta.
- Kmenta. I. 1986. Basic Econometric. Michigan State University.
- Pakpahan, A dan S.H. Suhartini. 1990. Perkembangan Keaneka Ragaman Konsumsi Pangan Rumah tangga Kota di Indonesia. Forum Statistik No 3. Tahun IX : 9 - 24
- Pakpahan, A. 1990. Refleksi Diversifikasi dalam Teori Ekonomi *dalam* Suryana *et al.* (penyunting) Diversifikasi Pertanian dalam Prospek Mercepat Laju Pembangunan Nasional. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. 1991. Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia dan Alternatif Upaya Penanggulangannya. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. 1992. Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia dan Alternatif Upaya Penanggulangannya. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. 1993. Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia dan Alternatif Upaya Penanggulangannya. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian. 2003. Prospek Diversifikasi Usahatani di Lahan Sawah (Kasus Empat Desa Kabupaten di Jawa). Laporan Hasil Penelitian kerjasama Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian dan Bappenas/USAID/DAI. Bogor.
- Rachmat, M dan B. Hutabarat. 1988. Tingkat Penerapan Diversifikasi Usahatani dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja. Forum Agro Ekonomi. No. 2 (6): 23-32
- Rasahan, C.A. 1988. Perspektif Struktur Pendapatan Masyarakat Pedesaan Dalam Hubungannya dengan Kebijakan Pembangunan Pertanian. *dalam* Prosiding PATANAS, Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor.
- Rusastra, I.W., H.P.Saliem, Supriyati, dan Saptana. 2004. Prospek Pengembangan Pola Tanam dan Diversifikasi Tanaman Pangan di Indonesia. Forum Agro Ekonomi, No. 1 (22): 27-53.
- Saliem, H.P., E.M. Lokollo, M. Ariani, T.B. Purwantini, dan Y. Marisa. 2001. Analisis Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga dan Regional. Laporan Penelitian Puslitbang Sosek Pertanian, Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian.
- Saliem, H.P., H. Mayrowani, Sumaryanto, G.S. Hardono, T.B. Purwantini, Y. Marisa, dan D. Hidayat. 2005. Diversifikasi Usaha Rumah Tangga dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Analisis Sosek dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian.
- Saliem, H.P., S.H. Suhartini, A. Purwoto, dan G.S. Hardono. 2003. Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Kinerja Ketahanan Pangan Nasional. Laporan Hasil Penelitian. Puslitbang Sosek Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian.
- Sawit, M.H. dan I.W. Rusastra. 2005. Globalisasi dan Ketahanan Pangan: Implikasi Buat Indonesia. (Draft - Bagian Laporan Penelitian "Road Map Memperkuat Kembali Ketahanan Pangan" – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia).
- Sayogyo. 1977. Golongan Miskin dan Partisipasi dalam Pembangunan Desa. Prisma No 3. tahun VI. : 10 – 18
- Simatupang, P. 2004. Prima Tani Sebagai Langkah Awal Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis Industri. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Penerapan dan Inovasi Teknologi dalam Agribisnis Sebagai Upaya Pengembangan Rumah tangga Petani. Puslitbang Sosek Pertanian – Universitas Widya Mataram, Yogyakarta (16 hlm).
- Sitepu, R.K. 2002. Dampak Kebijakan Ekonomi dan Liberalisasi Perdagangan terhadap Penawaran dan Permintaan Beras di Indonesia. Tesis Magister Sains. Program Pasca-sarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Strout, A.M. 1975. Some Definitional Problem with Multiple Crop Diversification, The Philippine Economic Journal, Vol XIV. No 1 dan 2.
- Sumaryanto. 2004. Usahatani dan Pendapatan Rumah tangga Petani Padi : Studi kasus di Persawahan DAS Brantas *dalam* Kasryno *et al.* (Eds) Ekonomi Padi dan Beras Indonesia (hlm. 225-252). Badan Litbang Pertanian. Jakarta.
- Susilowati, S.H, Supadi dan Ch. Saleh. 2002. Diversifikasi Sumber Pendapatan Rumah tangga di Pedesaan Jawa Barat. Jurnal Agro Ekonomi, No I (20): 85-109.

Syukur, M., H.P.Saliem dan S. Pasaribu. 1988. Pola Distribusi Pendapatan Rumah tangga di Pedesaan Jawa Barat *dalam* Prosiding PATANAS, Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor.

Theil, H. And Finke. 1983. The Consumer's Demand for Diversity Eur. Econ. Riview 23 (1983).